

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga Tahun 2017. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga dalam mengimplementasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran yang telah berjalan dan perjanjian kinerja untuk tahun yang akan berjalan. Proses kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP .

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2016 untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah , khususnya Dinkominfo Kab. Purbalingga.

Demikian LKJIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang. Terima kasih.

Purbalingga, Pebruari 2018

**Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga**



**Tri Gunawan Setyadi, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Ikhtisar Eksekutif	4
BAB I. PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Landasan Hukum	8
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJIP	8
D. Gambaran Umum Dinkominfo	9
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinkominfo.....	9
2. Susunan Kepegawaian	10
3. Sarana dan Prasarana	12
4. Kondisi Ekonomi	13
BAB II. Perencanaan Kerja	19
A. Rencana Strategis	
Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program, Kegiatan.....	19-22
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinkominfo	22
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017.....	24-27
BAB III. Akuntabilitas Keuangan Dinkominfo	28
A. Capaian Kinerja Dinkominfo	28
A.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran	29
A.2. Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran	35
A.3. Tingkat Keberhasilan	39
A.4. Tingkat Kegagalan	39
A.5. Hambatan	40
A.6. Upaya Mengatasi Hambatan	40
B. Akuntabilitas Keuangan	42
B.1. Pengelolaan Pendapatan Dinkominfo	42
B.2. Pelaksanaan APBD Tahun 2017	45
BAB IV. PENUTUP	57
A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan	57
B. Permasalahan Yang dihadapi	57
C. Upaya Mengatasi permasalahan.....	58

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu dinas daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021, telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”

Misi yang berkaitan dengan tugas Dinkominfo, terdapat pada dua misi, yakni Misi 1 : *Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.*

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Dinkominfo yang berkaitan dengan misi ini yakni urusan persandian.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika ditetapkan dalam misi Pemerintah Kabupaten yaitu pada misi ke-6 sebagai berikut *“Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonom, social dan budaya melalui gerakan masyarakat yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana wilayah yang memadai”*:

Tujuan

Adapun tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari misi ke-6 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Aman, Produktif Dan Berkelanjutan, dengan Sasaran : (1) Meningkatnya akses dan konektivitas wilayah; (2) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai; (3) Terwujudnya perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif; (4) Meningkatnya bangunan gedung laik fungsi; (5) Meningkatnya akses aman air minum yang berkelanjutan; (6) Meningkatnya akses air limbah domestik / rumah tangga; (7) Meningkatnya akses pelayanan persampahan; (8) Meningkatnya layanan sistem drainase perkotaan; dan (9) Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas jasa konstruksi.

Strategi yang diterapkan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah dengan :

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Jalan dan jembatan, dengan arah kebijakan berupa percepatan pembangunan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan jalan dan jembatan.
- b. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, dengan arah kebijakah melalui percepatan pembangunan serta optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi primer dan sekunder.
- c. Meningkatkan efektifitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan arah kebijakah berupa optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- d. Pendataan, pengendalian dan pengawasan pembangunan gedung, dengan arah kebijakah berupa optimalisasi implementasi peraturan perundangan tentang bangunan gedung.
- e. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi air minum perkotaan dan perdesaan, dengan arah kebijakan berupa percepatan pembangunan serta optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum perkotaan dan perdesaan.
- f. Mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik, dengan arah kebijakan berupa peningkatan fasilitasi pembangunan IPAL dan IPAL skala komunal.
- g. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana persampahan, dengan arah kebijakan berupa peningkatan manajemen dan sarana prasarana pengelolaan sampah.

- h. Mengurangi luas wilayah dan waktu genangan, dengan arah kebijakan berupa pembangunan dan peningkatan sistem drainase perkotaan.
 - i. Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi, dengan arah kebijakan berupa pembangunan sistem informasi jasa konstruksi.
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;
- Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas adalah dengan mengurangi luasan kawasan kumuh perkotaan, dengan arah kebijakan berupa upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana permukiman dan perumahan.
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Orang Dan Barang, dengan sasaran meningkatnya manajemen, kapasitas dan kualitas angkutan jalan dan udara.
- Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah melalui pemenuhan sarana prasarana utama dan penunjang angkutan jalan serta mendukung pembukaan akses transportasi udara komersial, dengan arah kebijakan berupa penyempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum serta fasilitasi pengembangan bandara Wirasaba.
4. **Meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik, dengan sasaran meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik.**
- Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah melalui upaya pengelolaan e-government serta meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dengan arah kebijakan berupa optimalisasi pemanfaatan e-government serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan desa, dengan sasaran meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa serta meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, dengan arah kebijakan berupa peningkatan pemberdayaan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat desa.

6. Terwujudnya Tertib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, dengan sasaran Meningkatnya Kepastian Status Dan Pemanfaatan Tanah.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah melalui upaya optimalisasi pemanfaatan tanah-tanah milik pemerintah daerah, dengan arah kebijakan berupa Peningkatan upaya pengelolaan tanah untuk kepentingan umum.

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat 5 (lima) program sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 yaitu :

- A. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
- B. Program Pengelolaan Persandian;
- C. Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
- D. Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
- E. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

Guna mencapai tujuan dan prioritas sasaran tersebut pada tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 5 program utama dengan 25 (dua puluh lima) kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp. 6.838.089.000,- (Enam milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan tersebut, menunjukkan capaian kinerja terhadap 4 (empat) sasaran, rata-rata menunjuk pada pencapaian skala “*baik*”, yaitu 86,66%

Untuk tingkat capaian **sasaran target - 1** : yaitu meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik yang terdiri dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

- a). Prosentase SKPD yang memiliki website dengan target 48 OPD, realisasi sebanyak 30 OPD atau 64%
- b). Intensitas updating informasi pada website pemerintah daerah dengan target 500 kali, realisasi 527 kali atau 105,4%.
- c). Jumlah pelayanan publik secara online dengan target 3 SIM realisasi 3 SIM atau 100%.
- d). Cakupan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasikan dengan target 520 kali, realisasi 1645 kali atau 316%.
- e). Cakupan wilayah yang terjangkau oleh siaran radio pemerintah daerah dengan target menjangkau 18 kecamatan, realisasi 18 kecamatan atau 100%.
- f). Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan dengan target 11 kelompok, realisasi 11 kelompok atau 100%.
- g). Cakupan kegiatan penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan radio, dengan target 12 kali realisasi sebanyak 11 kali atau 92%.
- h). Jumlah kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal dengan target 2 kali dan realisasi sebanyak 2 kali atau 100%.
- i). Jumlah komunikasi dan kerjasama dengan media masa (cetak dan online) dengan target 30 kali dan realisasi sebanyak 32 kali atau 107%.
- j). Jumlah kegiatan desiminasi informasi ke masyarakat melalui media masa dengan target 21 kali dan realisasi sebanyak 23 kali atau 119%.
- k). Ketersediaan data dasar pembangunan dengan target 198 bukuyang terdiri dari 18 Buku Purbalingga Dalam Angka dan 180 buku Kecamatan Dalam Angka, dengan realisasi sebanyak tersebut diatas atau 100%.

Pada pencapaian **sasaran target - 2**, yaitu meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana persandian dengan target 18 kecamatan, realisasi sebanyak 18 kecamatan atau 100%.

Meskipun tingkat capaian kinerja dari 5 (lima) program sasaran masuk dalam kategori “*baik*” atau rata-rata 86,66%, namun masih terdapat beberapa hambatan, yaitu :

- (1). Tidak terserapnya anggaran tahun 2017 secara maksimal dikarenakan banyak kegiatan yang dibiayai dari anggaran perubahan sementara waktunya sudah tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut.
- (2). Sarana dan Prasarana Kantor yang masih terbatas, sehingga belum mendukung kinerja pegawai.

Solusi yang dilakukan oleh Dinkominfo dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1). Pada tahun 2018 ini kegiatan akan dimulai berjalan pada awal tahun supaya sampai batas waktu yang ditentukan kegiatan dapat selesai pada waktunya.
- (2). Pada tahun 2018 ini mengajukan penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor yang belum ada sehingga dapat menunjang kinerja para pegawainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat

Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang lebih realistis, mendorong pemerintah untuk meninjau kembali sistem pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang lebih *accountable*, hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Hal tersebut di atas sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Dengan demikian jelas bahwa rakyat mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* yang menitikberatkan pada asas-asas demokrasi, transparansi dan partisipasi dalam setiap pelaksanaannya. Aspek-aspek ini merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan.

Oleh karena itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sistem ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) sebagai salah satu dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik secara transparan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2017.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Penjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinkominfo sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinkominfo 2016 – 2021;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan anggaran dalam rentang waktu satu tahun anggaran 2017

D. Gambaran Umum Dinkominfo

1. Tugas dan Fungsi Dinkominfo :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 90 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, pada Bab. II pasal 2 menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian dalam Bab III pasal 4 disebutkan tugas pokok Dinkominfo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi :

- a. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
- b. Sub Urusan Aplikasi Informatika yaitu :
 1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
 2. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah.
- c. Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi yaitu :
 1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- d. Sub Urusan Statistik Sektoral yaitu penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.

Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DINKOMINFO juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas,
Dinkominfo mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi ;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
3. pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut diupayakan secara optimal melalui peningkatan kinerja yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 – 2021

2. Susunan Kepegawaian

- (1) Susunan Organisasi DINKOMINFO, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik membawahi;
 1. Seksi Kehumasan;
 2. Seksi Informasi Komunikasi Publik ;

- d. Bidang Informatika, membawahi;
 - 1. Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK ;
 - 2. Seksi Tata Kelola *E-Government*;
- e. Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi, membawahi;
 - 1. Seksi Persandian;
 - 2. Seksi Statistik ;
 - 3. Seksi Telekomunikasi

1.1. Kondisi kepegawaian

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) sebagai dinas teknis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai dedikasi dan inovasi yang tinggi, serta memiliki kemampuan teknis di bidang teknologi Informasi, jumlah pegawai Dinkominfo sampai dengan Desember 2017 terinci sebagai berikut

a. Jumlah Pegawai	: 58 (lima puluh delapan) orang
Pegawai Negeri Sipil	: 38 (tiga puluh delapan) orang
PTT SK. Bupati	: - orang
PTT SK. Kepala Dinas	: 20 (dua puluh) orang
b. PNS Berdasarkan Pendidikan	
S2	: 4 (empat) orang
S1	: 26 (dua puluh enam) orang
Diploma III	: 3 (dua) orang
Diploma II	: - orang
SLTA	: 24 (dua puluh empat) orang
SLTP	: 1 (satu) orang
SD	: - orang
J u m l a h	: 58 (lima puluh delapan) orang
c. PNS Berdasarkan Golongan	
Golongan IV	: 5 (lima) orang
Golongan III	: 21 (dua puluh satu) orang
Golongan II	: 12 (dua belas) orang
Golongan I	: - orang
J u m l a h	: 38 (tiga puluh delapan) orang

d. PNS Berdasarkan Jenis kelamin

Laki-laki	: 44 (empat puluh empat) orang
Perempuan	: 14 (empat belas) orang
Jumlah	: 58 (lima puluh delapan) orang

e. Pembagian Pesonil

NO.	BIDANG/UNIT	PNS/CPNS	NON PNS (PTT)
1	Kepala Dinas	1	
1	SEKRETARIAT	10	1
2	BIDANG SANDI, STATISTIK DAN TELEKOMUNIKASI	12	1
3	BIDANG HUMAS DAN IKP	8	15
4	BIDANG INFORAMTIKA	7	3
JUMLAH		38	20

2. Sarana dan Prasarana :

a. Prasarana Infrastruktur Gedung pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- 1) Gedung Kantor Dinas
- 2) Gedung LPPL Radio Gema Soedirman
- 3) Gedung Santel
- 4) Gedung Sekretariat LPSE

b. Daftar Asset

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1) Tanah | : Rp. 367.602.000,- |
| 2) Peralatan dan mesin | : Rp. 3.463.250.349,- |
| 3) Gedung dan Bangunan | : Rp. 1.024.624.000,- |
| 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan | : Rp. 16.589.900,- |

Secara keseluruhan asset yang dikelola Dinkominfo terdiri dari KIB A – D senilai Rp. 4.504.464.249,- (Empat milyar lima ratus empat juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah)

1. Kondisi Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur termasuk didalamnya pembangunan sarana komunikasi dan informatika dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas di dalam wilayah. Melalui penguatan konektivitas antar wilayah dan di dalam wilayah itu sendiri diharapkan akan menurunkan biaya transportasi barang dan jasa khususnya ke wilayah-wilayah yang berada jauh dari lokus produksi barang yang nantinya akan menguntungkan para pelaku usaha (produsen) dan masyarakat (konsumen). Adapun fasilitas Dinkominfo yang mendukung kegiatan ekonomi, yaitu :

5.1. Fasilitas Komunikasi dan Informatika :

- a. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Soedirman–96.3 FM
- b. Jaringan Internet pada OPD yang terkoneksi dengan Dinkominfo Purbalingga adalah sebagai berikut :

- 1. *Sistem Pendataan Pendidikan Dasar*
- 2. *SIMDA*
- 3. *SIMDA ASET*
- 4. *SIPKD*
- 5. *SIMBADA*
- 6. *SIMGAJI*
- 7. *SISMIOP*
- 8. *SIMPADA*
- 9. *SIM-NUPTK*
- 10. *BIOS*
- 11. *BOS KITA*
- 12. *SOP Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Profil Sekolah*
- 13. *SIM Dapodik*
- 14. *Emis dan Trims*
- 15. *Aplikasi Laboratorium Bahasa*
- 16. *Sistem Informasi Pembelajaran*
- 17. *Aplikasi Biosystem Ver 3.8*
- 18. *Aplikasi Software Pembelajaran*
- 19. *Sistem Informasi Kesehatan*
- 20. *Sistem Informasi Pelayanan Rumah Sakit*
- 21. *Sistem Informasi Kepegawaian*
- 22. *Sistem Informasi Manajemen Apotik*

23. *Sistem Surat Elektronik*
 24. *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*
 25. *Program Aplikasi Informasi*
 26. *Sistem Penyusunan Data UMKM*
 27. *Sistem Informasi Perizinan*
 28. *SIMWAS (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan)*
 29. *SIPTL (Pengelolaan Pemantauan Pelaporan TLRHP BPK-RI)*
 30. *SIMHP*
 31. *SIAK*
 32. *e-Kepegawaian*
- c. Untuk layanan komunikasi data tersedia melalui website : purbalinggakab.go.id dan mempunyai 28 sub domain di masing-masing OPD, yaitu :
1. WWW.bupati.purbalinggakab.go.id
 2. WWW.wabup.purbalinggakab.go.id
 3. WWW.bapem.purbalingga.go.id
 4. WWW.bakeuda.purbalinggakab.go.id
 5. WWW.dinporapar.purbalinggakab.go.id
 6. WWW.dindikbud.purbalinggakab.go.id
 7. WWW.dinkes.purbalinggakab.go.id
 8. WWW.dinpertan.purbalinggakab.go.id
 9. WWW.dkpp.purbalinggakab.go.id
 10. WWW.dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id
 11. WWW.dpupr.purbalinggakab.go.id
 12. WWW.dinhub.purbalinggakab.go.id
 13. WWW.bapelitbangda.purbalinggakab.go.id
 14. WWW.dinperindag.purbalinggakab.go.id
 15. WWW.dinpermasdes.purbalinggakab.go.id
 16. WWW.Dinsosdaldukkb3a.purbalinggakab.go.id
 17. WWW.bkppd.purbalinggakab.go.id
 18. WWW.bpbdd.purbalinggakab.go.id
 19. WWW.dlh.purbalinggakab.go.id
 20. WWW.dinarspus.purbalinggakab.go.id
 21. WWW.dpmpstsp.purbalinggakab.go.id
 22. WWW.rsud.purbalinggakab.go.id
 23. WWW.plid.purbalinggakab.go.id

24. *W WW. jdih.purbalinggakab.go.id*
25. *WWW. satpolpp.purbalinggakab.go.id*
26. *WWW. sekretariatdprd.purbalinggakab.go.id*
27. *WWW. dinsos.purbalinggakab.go.id*
28. *WWW. pkk.purbalinggakab.go.id*
29. *WWW. dinkopukm.purbalinggakab.go.id*
30. *WWW. Dinrumkin.purbalinggakab.go.id*
31. *WWW. Kecamatanbobotsari.purbalinggakab.go.id*
32. *WWW. Kecamatankutasari.purbalingga.go.id*
33. *WWW. Inspektorat.purbalingga.go.id*

d. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Sesuai dengan Perpres. No.4 Tahun 2015 Perubahan ke 4 atas Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka di Kabupaten Purbalingga untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah di lakukan melalui LPSE, yaitu

- 1). Pengadaan barang pemerintah dengan anggaran lebih dari Rp. 200.000.000,-
- 2). Pengadaan Jasa Konsultan dengan anggaran lebih dari Rp. 50.000.000,-

e. Layanan dan Pengolahan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diberlakukan sejak tanggal 30 April 2010 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka salah satu konsekuensinya adalah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 550/273 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola dan Sekretariat PPID, serta PPID Pembantu pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang diperbaharui dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/106 Tahun 2014 tentang Penetapan PPID , PPID Pembantu dan Sekretariat PPID pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sebagai landasan opsional PPID Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Layanan permohonan informasi secara langsung/ melalui tatap muka dapat dilayani melalui Sekretariat PPID di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Jl. Letkol Isdiman No 5 Purbalingga sedangkan layanan permohonan secara online dapat dialamatkan ke ppid@purbalinggakab.go.id dan sebagai media layanan informasi publik oleh PPID telah disusun sub domain dengan alamat *ppid.purbalinggakab.go.id*

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat Dinkominfo dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perhubungan komunikasi dan informatika selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021 .

Untuk mewujudkan Renstra tersebut ditetapkan Visi dan Misi yang rasional sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yaitu :

A.1. Visi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu dinas daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah. Dalam rangka turut berperan serta mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :**“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”**

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat

dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Tujuh Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

A.2. M I S I :

Misi yang berkaitan dengan tugas Dinkominfo, terdapat pada dua misi, yakni Misi 1 : *Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.*

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Dinkominfo yang berkaitan dengan misi ini yakni urusan persandian.

Misi lain yang berkaitan dengan tugas Dinkominfo adalah misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai. Salah satu tujuan misi ini yang berkaitan dengan fungsi Dinkominfo adalah : Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik, dengan sasaran Meningkatnya Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mewujudkan misi sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik, dengan sasaran Meningkatnya Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana persandian
- 3) Menyediakan data dan informasi pembangunan yang *reliable* dan *up to date*.

A.3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana persandian
3. Meningkatnya kualitas SDM di bidang komunikasi dan informatika;
4. Meningkatnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
5. Meningkatnya kelancaran akses jaringan TIK di Kabupaten Purbalingga.

A.4. Kebijakan

1) Urusan Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan pembangunan Sub sektor komunikasi dan Informatika diarahkan untuk :

1. Meningkatkan fasilitas layanan Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat guna mempermudah dan mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi.
2. Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka **e-Government** di Kabupaten Purbalingga
3. Optimalisasi kualitas pelayanan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK.)
4. Peningkatan pemberdayaan stakeholder lain (masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha) dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Arah dari kebijakan sub sektor ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya dibidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkat pula partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

A.5. Prioritas Dinkominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam Program – program kegiatan yang terdiri 5 (lima) Program sebagai berikut :

- A. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
- B. Program Pengelolaan Persandian;
- C. Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi, linformasi dan Komunikasi;

D. Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

E. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

1. Pelaksanaan Program-program tersebut dijabarkan dalam beberapa

Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
- b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- d. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
- e. Pendidikan dan pelatihan pegawai
- f. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja

2. **Program Pengelolaan Persandian**

- a. Pengadaan dan Pemeliharaan Sandi dan Telekomunikasi

3. **Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi**

- a. Pemeliharaan Website dan Jaringan Internet.
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi Informasi Terintegrasi.
- c. Teleconference, SMS Center dan Paper Less Office
- d. Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE

4. **Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah**

- a. Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah
- b. Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah / SIPD (Bangub)
- c. Verifikasi dan Validasi Data PBDT Tahun 2015
- d. SIPD (Bangub)

5. **Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik**

- a. Pembinaan dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Internet
- b. Fasilitasi dan Pembinaan Forum Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- c. Operasional Pendampingan PPID
- d. Penyiaran Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

- e. Konferensi Pers dan Liputan
- f. Peningkatan Kualitas Fungsi Bakohumas
- g. Peningkatan Kapasitas Kehumasan
- h. Sosialisasi Kebijakan Pemkab melalui Media Cetak dan Elektronik
- i. Fasilitasi Penerbitan dan Pengembangan Media Cetak milik Pemerintah
- j. Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab
- k. Fasilitasi LPPL

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

Dalam rencana kinerja Tahun 2017 Dinkominfo sasaran , indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
RENSTRA DINKOMINFO 2016 – 2021

Tujuan 1 : Meningkatnya keterbukaan informasi publik

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSTISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi public	Persentase SKPD yang menerapkan SIM dn memiliki website aktif	Person	25	28	31	34	37	40	43

Tabel 4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
DINKOMINFO Tahun 2016 – 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik	1 Persentase SKPD yang menerapkan SIM dan memiliki website aktif	1 Peningkatan intensitas publikasi informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur serta pengembangan sistem informasi manajemen di tiap SKPD 2 Penguatan kemitraan dengan kelompok / organisasi masyarakat mengoptimalkan peran kelompok / organisasi masyarakat	1 Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi publik serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan berbasis TIK 2 Mengoptimalkan peran kelompok/ organisasi masyarakat

Tabel 5

Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Misi 6

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	1 Meningkatkan implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD yang menerapkan SIM dan memiliki website aktif	1. Peningkatan intensitas publikasi informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	1. Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi publik serta meningkatkan kualitas infrastruktur

				infrastruktur serta pengembangan system informasi manajemen di tiap SKPD	ur dan pelayanan berbasis TIK
				2. Penguatan kemitraan dengan kelompok / organisasi masyarakat Mengoptimalkan peran kelompok / organisasi masyarakat	3. Mengoptimalkan peran kelompok / organisasi masyarakat

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Mendasarkan pada RENSTRA 2016-2021 setelah ditetapkan APBD Tahun 2017 maka dibuat Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Dinkominfo dengan Bupati Purbalingga selaku Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

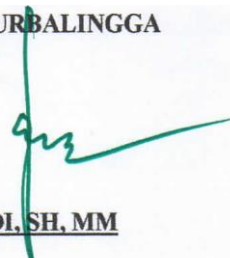
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik	1	Presentase SKPD yang memiliki website	48 OPD
		2	Intensitas upfisting informasi pada website Pemerintah Daerah	500 kali
		3	Jumlah SIM milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif	32 SIM
		4	Jumlah Pelayanan publik secara online	3 SIM
		5	Cakupan kegiatan Pemerintah dan pembangunan yang terpublikasi	520 kali
		6	Cakupan wilayah yang terjangkau oleh siaran radio Pemerintah Daerah	18 Kec
		7	Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan	11 kelompok
		8	Cakupan kegiatan penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan radio	12 kegiatan
		9	Jumlah kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal	2 kali
		10	Jumlah komunikasi dan kerjasama dengan media masa (cetak dan online)	30 kali
		11	Jumlah kegiatan desiminasi informasi ke masyarakat melalui media masa	21 kegiatan
		12	Ketersediaan data dasar pembangunan	198 buku
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana Persandian	1	Cakupan informasi Pemerintah Daerah melalui Sandi dan Telekomunikasi yang tersampaikan	18 kec

SEBELUM PERUBAHAN

KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Program Penguatan Kelembagaan		
Perangkat Daerah	Rp 485.000.000	
1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Rp 120.000.000	
2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp 100.000.000	
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rp 120.000.000	
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rp 80.000.000	
5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Rp 55.000.000	
7 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Rp. 10.000.000	
Program Pengelolaan Persandian	Rp. 66.000.000	
1. Pengadaan dan Pemeliharaan Sandi dan Telekomunikasi	Rp. 66.000.000	
Program Pengembangan Pemanfaatan		
Teknologi Komunikasi dan Informasi	Rp 612.276.000	
1 Pemeliharaan Website dan Jaringan Internet	Rp 38.700.000	
2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi Informasi terintegrasi	Rp 338.576.000	
3 Teleconference, SMS Center dan Paper Less Office	Rp 110.000.000	
4 Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE	Rp 125.000.000	
Program Penyediaan Data dan Informasi	Rp. 431.540.000	
Pembangunan Daerah		
1. Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah	Rp. 99.960.000	
2. Penyusunan Sistem Informasi Profil daerah / SIPD (Bangub)	Rp. 74.580.000	
3. Verifikasi dan Validasi Data PPDT Tahun 2015	Rp. 257.000.000	

Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Rp 2.398.847.000
1. Pembinaan dan monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Warnet	Rp 15.000.000
2. Fasilitasi dan Pembinaan Forum Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Rp. 50.000.000
4. Pembangunan Gedung LPPL Radio Ardilawet	Rp 855.000.000
5. Operasional Pendampingan PPID	Rp 15.000.000
6. Penyiaran Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Rp 25.000.000
7. Konferensi Pers dan Liputan	Rp 174.000.000
8. Peningkatan Kualitas Fungsi Bakohumas	Rp 35.000.000
9. Peningkatan Kapasitas Kehumasa	Rp 61.500.000
10. Sosialisasi Kebijakan Pemkab melalui media cetak Dan elektronik	Rp 647.582.000
11. Fasilitasi Penerbitan dan pengembangan Media Cetak Milik Pemerintah	Rp 125.400.000
12. Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab	Rp 395.365.000
Jumlah Anggaran	Rp 3.993.663.000

Purbalingga, Januari 2017

BUPATI PURBALINGGA

H. TASDI, SH, MM

**Kepala Dinas
 Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Purbalingga**

Tri Gunawan Setyadi, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP.19690222 199603 1 004

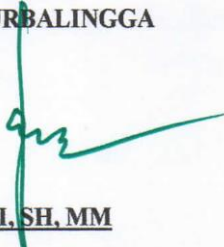
SETELAH PERUBAHAN

KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Program Penguatan Kelembagaan		
Perangkat Daerah	Rp 873.800.000	
1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Rp 247.000.000	
2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp 200.000.000	
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rp 174.000.000	
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rp 187.800.000	
5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Rp 55.000.000	
7 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Rp. 10.000.000	
Program Pengelolaan Persandian	Rp. 66.000.000	
2. Pengadaan dan Pemeliharaan Sandi dan Telekomunikasi	Rp. 66.000.000	
Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Rp 770.476.000	
1 Pemeliharaan Website dan Jaringan Internet	Rp 45.900.000	
2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi Informasi terintegrasi	Rp 489.576.000	
3 Teleconference, SMS Center dan Paper Less Office	Rp 110.000.000	
4 Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE	Rp 125.000.000	
Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Rp. 174.940.000	
1. Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah	Rp. 99.960.000	
2. Penyusunan Sistem Informasi Profil daerah / SIPD (Bangub)	Rp. 74.580.000	
3. Verifikasi dan Validasi Data PPDT Tahun 2015	Rp 400.000	

Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Rp 1.599.247.000
3 Pembinaan dan monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Warnet	Rp 15.000.000
4 Fasilitasi dan Pembinaan Forum Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Rp. 50.000.000
1. Pembangunan Gedung LPPL Radio Ardilawet	Rp 855.000.000
2. Operasional Pendampingan PPID	Rp 15.000.000
3. Penyiaran Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Rp 25.000.000
4. Konferensi Pers dan Liputan	Rp 174.000.000
5. Peningkatan Kualitas Fungsi Bakohumas	Rp 35.000.000
6. Peningkatan Kapasitas Kehumasa	Rp 61.500.000
7. Sosialisasi Kebijakan Pemkab melalui media cetak Dan elektronik	Rp 647.582.000
8. Fasilitasi Penerbitan dan pengembangan Media Cetak Milik Pemerintah	Rp 125.400.000
9. Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab	Rp 395.365.000
Jumlah Anggaran	Rp 3.484.463.000

Purbalingga, Januari 2017

BUPATI PURBALINGGA



H. TASDI, SH, MM

**Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga**



Tri Gunawan Setyadi, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DINKOMINFO

A. CAPAIAN KINERJA DINKOMINFO

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinkominfo kabupaten purbalingga. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2017 ada 4 (empat) aspek yang akan dibahas, yaitu :

A.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis

A.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

A.3. Tingkat keberhasilan kinerja sasaran

A.4. Tingkat kegagalan kinerja sasaran

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis

Hingga akhir tahun 2017 Dinkominfo telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi public, dengan sasaran meningkatnya implementasi *e-government* dan keterbukaan informasi public
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana persandian

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ke 4 (empat) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik:

Sasaran ini tercapai melalui Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Bahan dan Jasa perkantoran
- b. Rapat – Rapat koordinasi dan konsultasi
- c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- d. Pengadaan Sarana dan prasarana kantor
- e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- f. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD

Adapun pencapaian sasaran ini adalah melalui beberapa indikator kinerja, yaitu :

- 1) Tercukupinya kebutuhan administrasi kantor
- 2) Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi instansi
- 3) Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor
- 4) Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor
- 5) Terlaksananya Diklat Pegawai
- 6) Tersusunnya buku laporan LKPJ, LPDD, LAKIP, LKD dan PK

Untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran tersebut tersaji dalam matrik dibawah ini, yaitu :

NO	SASARAN TARGET	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	R/T X 100
1	Meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD yng memiliki website	48 OPD	30 OPD	64%
		Intensitas updating informasi pada website Pemerintah Daerah	500 kali	527 kali	107,4%
		Jumlah SIM milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif	32 SIM	32 SIM	100%
		Jumlah pelayanan publik secara online	3 SIM	3 SIM	100%
		Cakupan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi	520 kali	1645 kali	316%
		Cakupan wilayah yang terjangkau oleh siaran radio Pemerintah Daerah	18 Kec	18 kec	100%
		Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan	11 Klp	11 klp	100%
		Cakupan kegiatan penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan dan radio	12 kali	11 kali	92%
		Jumlah kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan Instansi vertikal	2 kali	2 kali	100%
		Jumlah komunikasi dan kerjasama dengan media massa (cetak dan online)	30 kali	32 kali	107%

		Jumlah kegiatan desiminasi informasi ke masyarakat melalui media masa	21 keg	23 keg	119%
		Ketersediaan data dasar pembangunan	198 buku	198 buku	100%
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana Persandian	Cakupan informasi Pemerintah Daerah melalui SANTEL yang tersampaikan	18 kec	18 kec	100%

Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 tahun adalah sebesar 86,66%, dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran tersebut masuk kategori “Baik”

2. Sasaran meningkatnya implementasi *e-government* dan keterbukaan informasi publik:

Sasaran ini tercapai melalui Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan website dan jaringan internet
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung teknologi terintegrasi;
- c. Pembinaan dan monitoring PLIK, MPLIK dan Warnet;
- d. Fasilitasi dan pembinaan Forum Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat
- e. Teleconference dan sms center
- f. Pengadaan dan pemeliharaan perangkat LPSE
- g. Penyusunan Raperda pengelolaan, perijinan dan pengendalian retribusi menara;
- h. Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)
- i. Optimalisasi pendampingan penyiaran
- j. Relokasi gedung LPPL Purbalingga Radio Suara Perwira (RSP).

Untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui beberapa indikator kinerja, yaitu :

- a. Jumlah desa yang terjangkau layanan telekomunikasi
- b. Jumlah Warung internet
- c. Jumlah hot spot area di ruang publik
- d. Rasio penduduk pengguna internet
- e. Rasio penduduk pengguna telepon / hp
- f. Jumlah SKPD memiliki website
- g. Jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) pemerintahan daerah yang terintegrasi
- h. Jumlah pelayanan publik secara online
- i. Jumlah publikasi Pemda melalui siaran radio
- j. Jumlah kegiatan pembangunan pemerintahan yang terdokumentasi

A.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

1) Sasaran 1, Tata kelola pemerintahan yang baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-1** dari 6 (enam) indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dapat dicapai kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 81%. Hal ini dikarenakan pada indikator tercukupinya administrasi kantor dengan anggaran sebesar Rp. 247.000.000,- hanya bisa terserap sebesar Rp. 179.471.055,- terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 67.528.945,- kemudian pada indikator terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dengan anggaran sebesar Rp. 174.000.000,- hanya bisa terserap sebesar Rp. 109.772.500,- atau 63%, terdapat selisih anggaran Rp. 64.227.500,- selanjutnya pada indikator terlaksananya diklat pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- hanya bisa terserap sebesar Rp. 26.836.498,- dengan hanya memberangkatkan sebanyak 24 orang pegawai dari jumlah pegawai secara keseluruhan 47 orang atau hanya 49%. Dan realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan untuk 25 kegiatan sebesar 86,66%. Meskipun demikian pencapaian dari sasaran ini masuk dalam kategori *“baik”*

2) **Sasaran 2, Meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi public.**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 2, dari 12 (dua belas) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dapat dicapai melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 115,9% atau dapat dikatakan masuk dalam kategori **“amat baik”**

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah jenis pelayanan publik secara online tahun 2017 adalah 37 (1 Portal Purbalingga, 1 Website Purbalingga, 33 sub domain, 1 Sistem Surat Elektronik, 1 LPSE, 1 sms center) atau 100 % dari target yang di tentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2016 yaitu 31 (1 website Purbalingga, 28 sub domain, 1 Sistem Surat Elektronik dan 1 LPSE). Realisasi RPJMD 2015 – 2019 cenderung meningkat, realisasi tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan RPJMD.

Upaya untuk mengelola sub domain dilakukan dengan mengadakan pelatihan atau bintek tentang website dan pengetahuan TIK kepada admin website OPD dan menghimbau agar aktif mengupdate data setiap ada berita tentang kegiatan di masing-masing OPD atau informasi terbaru. Meskipun ada beberapa admin website OPD yang kurang aktif dalam mengelola websitenya karena keterbatasan personil, Dinas Komunikasi dan Informatika selalu berusaha melakukan koordinasi melalui media sosial dan pembinaan kepada OPD terkait.

Disamping mengelola website OPD juga memfasilitasi pembuatan website Desa yang diprogramkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sejak tahun 2016 dimana targetnya adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Purbalingga, untuk tahun 2016 sudah terlayani pembuatan website desa sebanyak 46 desa. Sebagian besar desa sudah melakukan update data mengenai informasi tentang desa, potensi desa, produk desa dan informasi yang lain dalam rangka keterbukaan informasi publik meskipun masih ada beberapa desa yang belum aktif secara kontinyu mengupdate dikarenakan keterbatasan SDM. Sampai tahun 2017 sudah ada 60 desa yang sudah

mempunyai website desa, dan masih ada sekitar 9 desa dalam proses pembuatan website desa. Dalam upaya mencapai target terpenuhinya website desa diseluruh Kabupaten Purbalingga, kami melakukan koordinasi dengan pemangku wilayah Camat se Kabupaten Purbalingga guna mendorong desa-desa di wilayahnya agar membuat website, juga lewat forum juguran desa dan bintek serta sosialisasi tentang website serta lewat media sosial.

A.3. Tingkat Keberhasilan Kinerja Sasaran

Secara Umum pada tahun 2017 Dinkominfo dapat melaksanakan 2(dua) sasaran yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 115,9% atau masuk dalam kategori **“amat baik”**,

A.4. Tingkat Kegagalan kinerja sasaran

Selain tingkat keberhasilan tersebut, pada tahun 2017 terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak bisa tercapai 100%, namun masuk dalam kategori baik, yaitu pada sasaran:

A.4.1. Sasaran Tata kelola pemerintahan yang baik,

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-1** dari 6 (enam) indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dapat dicapai kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 81%. Hal ini dikarenakan pada indikator tercukupinya administrasi kantor dengan anggaran sebesar Rp. 247.000.000,- hanya bisa terserap sebesar Rp. 179.471.055,- terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 67.528.945,- kemudian pada indikator terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dengan anggaran sebesar Rp. 174.000.000,- hanya bisa terserap sebesar Rp. 109.772.500,- atau 63%, terdapat selisih anggaran Rp. 64.227.500,- selanjutnya pada indikator terlaksananya diklat pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- hanya bisa terserap sebesar Rp. 26.836.498,- dengan hanya memberangkatkan sebanyak 24 orang pegawai dari jumlah pegawai secara keseluruhan 47 orang atau hanya 49%.

Hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran:

Meskipun tingkat capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran masuk dalam kategori “*amat baik*” atau rata-rata 115,9%, namun masih terdapat beberapa hambatan, yaitu :

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan)	
Gambaran pelayanan OPD	Telah tercapai dan perlu penyempurnaan	RPJMD Kab. Purbalingga 2016-2021	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Lembaga maupun institusi pendidikan yang bergerak di bidang TIK	Implementasi SOP belum optimal
Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	Purbalingga telah memiliki ... saluran komunikasi publik	Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Implementasi SOP belum optimal
Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika	Purbalingga telah memiliki ... aplikasi yang mendukung pelayanan publik.	Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Lembaga maupun institusi pendidikan yang bergerak di bidang TIK	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat
RTRW Kab. Purbalingga	Penataan struktur sistem jaringan telekomunikasi belum optimal	RTRW Kab. Purbalingga	Pengembangan infrastruktur TIK	Lembaga maupun institusi pendidikan yang bergerak di bidang TIK	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
KLHS RPJMD Kab. Purbalingga tahun 2016-2021	Monitoring untuk pembatasan terhadap akses informasi berbahaya rutin dilakukan setiap bulan	KLHS RPJMD Kab. Purbalingga tahun 2016-2021	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK

A.6. Upaya mengatasi Hambatan :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka Dinkominfo mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu pemanfaatan TIK tentang bagaimana mensosialisasikan layanan publik yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat agar mereka mau memanfaatkannya, diperlukan pengelolaan komunikasi dan informasi kepada khalayak yang berkaitan dengan Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan Fungsi GPR (Government Public Relations), memanfaatkan banyaknya Lembaga maupun institusi pendidikan di Purbalingga yang bergerak di bidang TIK.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

B.3. Pelaksanaan APBD Dinkominfo Tahun 2017

1. Realisasi anggaran belanja tahun 2017

Guna mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 5 program utama dengan 25 (dua puluh lima) kegiatan yang didukung anggaran belanja sebesar Rp. 6.838.089.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), terdiri dari :

1) **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 3.353.626.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.332.635.157,- terdapat selisih sebesar Rp. 20.990.843,- terdiri dari :

1. Gaji pegawai sebesar Rp. 2.531.491.000,- realisasi Rp. 2.516. 143.157,- sisa anggaran Rp. 15.347.843,-
2. Tambahan Penghasilan pegawai sebesar Rp. 822.135.000,- realisasi Rp. 816.492.000,- sisa anggaranRp. 5.643.000,-

F. **Belanja Langsung** sebesar Rp. 3.484.463.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.019.801.719,- atau sebesar 86,66 %, terdapat selisih sebesar Rp. 464.661.281 ,- terdiri dari selisih beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Belanja pegawai berupa Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 300.173.000 ,-
- b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.228.193,230,- terdiri dari :
 1. Belanja Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran sebesar Rp. 111.371.055,-
 2. Belanja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi sebesar Rp. 194.807.872,-
 3. Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor sebesar Rp. 109.772.550,-
 4. Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sebesar Rp. 800.000,-
 5. Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebesar Rp. 26.836.498,-
 6. Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD sebesar Rp. 4.202.600,-
 7. Belanja Pemeliharaan Website dan Jaringan Internet sebesar Rp. 18.579.665,-
 8. Belanja Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi Informasi Terintegrasi Rp. 363.510.822,-
 9. Belanja Teleconference, SMS Center, dan Paperles Office Rp. 59.171.655,-
 10. Belanja Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE Rp.51.672.216,-
 11. Belanja Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab Rp. 388.794.769,-
 12. Belanja Fasilitas LPPL Rp. 224.188.458,-
 13. Belanja Pembinaan dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Warnet Rp. 12.489.550,-
 14. Belanja Fasilitas dan Pembinaan Forum Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Rp. 30.854.100,-
 15. Belanja Operasional Pendampingan PPID Rp. 5.972.500,-

16. Belanja Penyiaran Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Rp. 1.000.000,-
 17. Belanja Konferensi Pers dan Liputan Rp. 120.815.381,-
 18. Belanja Peningkatan Kualitas Fungsi Bakohumas Rp. 27.095.089,-
 19. Belanja Peningkatan Kapasitas Kehumasan Rp. 45.037.500,-
 20. Belanja Sosialisasi Kebijakan Pemkab melalui Media Cetak dan Elektronik Rp. 157.988.500,-
 21. Belanja Fasilitas Penerbitan dan pengembangan Media Cetak Milik Pemerintah Rp. 95.160.500,-
 22. Belanja Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah Rp. 93.542.950,-
 23. Belanja Verifikasi dan Validasi Data PBDT Tahun 2015 Rp. 338.500,-
 24. Belanja SIPD (Bangub) Rp. 25.970.500,-
 25. Belanja Pengadaan dan Pemeliharaan Sandi dan Telekomunikasi Rp. 58.220.000,-
- c. Belanja Modal sebesar Rp. 488.648.539,- terdiri dari :
1. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Rp. 184.808.600,-
 2. Belanja modal Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi Informasi Terintegrasi Rp. 115.265.646,-
 3. Belanja modal Teleconference, SMS Center dan Paperless Office Rp. 34.044.793,-
 4. Belanja modal Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE Rp. 40.634.500,-
 5. Belanja modal Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab Rp. 31.000.000,-
 6. Belanja modal Fasilitas LPP Rp. 17.848.500,-
 7. Belanja modal Pembinaan dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Warnet Rp. 2.300.000,-

8. Belanja Modal Konferensi Pers dan Liputan Rp. 56.883.500,-
9. Belanja Modal Pengadaan dan Pemeliharaan Sandi dan Telekomunikasi Rp. 7.780.000,-

Untuk lebih jelasnya kami sajikan dalam tabel penggunaan anggaran belanja Dinkominfo T.A. 2017 sebagai berikut :

TABEL BELANJA
DINKOMINFO KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2017

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Selisih	%
Belanja Daerah				
a. Belanja Tidak Langsung	3.353.626.000,-	3.332.635.157,-	20.990.843,-	99,4
Belanja Pegawai :	3.353.626.000,-	3.332.635.157,-	20.990.843,-	99,4
b. Belanja Langsung	3.484.463.000,-	3.017.014.769,-	467.448.231,-	88,66
• Belanja Pegawai	300.173.000,-	300.173.000,-	0,-	100
• Belanja Barang dan Jasa	2.695.641.461,-	2.228.193.230,-	467.448.231	82,6
• Belanja Modal	488.648.539,-	488.648.539,-	0,-	100
•				
Jumlah	6.838.089.000.-	6.349.649.926,-	488.439.074,-	92,85

Lebih rinci mengenai pengelolaan belanja pada Dinkominfo tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinkominfo Tahun anggaran 2017 sebagaimana terlampir

2. Realisasi Program dan Kegiatan :

- 2.1.1. Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran, target kegiatan dimaksud yaitu tercukupinya honor THL SK. Kepala Dinas, Honor Pengelola Keuangan, dan kebutuhan administrasi kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 247.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.179.471.055,- (72,66%) terdapat sisa

anggaran sebesar Rp. 67.528.945,- serta realisasi fisik sebesar 72,70%

2.1.2. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, target pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebanyak 493 kali, dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dan Realisasi Keuangan sebesar Rp.194.807.872,- (97,40%) terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp. 5.192.128,-serta realisasi fisik sebesar (97,40%)

2.1.3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, target pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor berupa 1 (gedung), gedung, 4 (empat) kendaraan roda empat, 13 (tiga belas) kendaraan roda dua dan peralatan kantor lainnya, bahan bakar minyak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 174.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.109.772.500,- (63,09%) terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp. 64.227.500,- serta realisasi fisik sebesar 63,09%.

2.1.4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, target dari kegiatan ini adalah berupa pengadaan barang berupa 1 paket gorden, 3 microphone, 2 lemari besi, 2 lemari kayu, 1 finger print, 3 papan dinas, 5 kursi kerja, 5 meja kerja, 2 set meja kursi tamu, 30 kursi lipat, 6 meja rapat, 1 TV, 1 AC, 1 kipas angin, 1 paket tralis, 1 PC, 3 Laptop, 2 printer, dan 1 Handycam dengan alokasi anggaran sebesar Rp.187.800.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 185.608.600,- atau sebesar 98,83 %, dan realisasi fisik sebesar 98,80%

2.1.5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, target kegiatan dimaksud yaitu terdidiknya 45 (empat puluh lima) pegawai negeri sipil Dinkominfo, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.836.498,- (48,79%) serta realisasi fisik sebanyak 24 orang pegawai mengikuti diklat/bimtek (53,3%)

2.1.6. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.770.600,- (97,71%), serta realisasi fisik

sebesar 100%., yaitu berupa tersusunnya dokumen LKjIP, LKPJ, RENSTRA SKPD, Renja dan LKD masing masing rangkap 5 (lima)

2.2. Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi

- 2.2.1.** Kegiatan Pemeliharaan Website dan Jaringan Internet, realisasi dari kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya 1 (satu) website purbalingga, 27 subdomaian, 14 yang ada di 30 SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.900.000,- realisasi Rp. 43.589.665,- (94,97 %) dan realisasi fisik sebesar 95%. Permasalahan yang ada yaitu belum maksimalnya update data sub domain yang ada di masing-masing SKPD, hal ini dikarenakan petugas yang sudah mendapat pelatihan updating sebagian ada yang mutasi. Solusinya yaitu 1. Pendampingan update conten dan berita oleh petugas dari Dinkominfo. 2. Penggantian personil.
- 2.2.2.** Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi Informasi Terintegrasi, target dari kegiatan dimaksud yaitu pembayaran Astinet untuk 12 bulan, bandwith 15 Mbps, 50 Mbps, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 489.576.000,- realisasi Rp. 478.776.468,- (97,79%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 10.799.532,-. Dengan perhitungan awal tahun belum bisa untuk pencairan anggaran mengingat koneksi Astinet untuk LPSE sangat vital jangan sampai terputus, pada kenyataannya penggunaan APBD hanya untuk tahun berjalan. Realisasi fisik sebesar 97,80%
- 2.2.3.** Kegiatan Teleconference, SMS Center dan Paperless Office, target dari kegiatan yang dimaksud adalah pembentukan 73 user id dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 97.556.448,- (88,69%), realisasi fisik sebesar 88,70% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 12.443.552,-
- 2.2.4.** Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE, target dari kegiatan yang dimaksud adalah terpenuhinya operasional LPSE dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 122.506.716,- (98,01%) realisasi fisik sebesar 98% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.493.284,-

2.3. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

- 2.3.1.** Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Warnet, target dari kegiatan dimaksud yaitu terbinanya 18 PLIK, dan 60 warnet, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 14.789.550,- (98,60 %) dan realisasi fisik sebesar 98,60%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 210.450,-
- 2.3.2.** Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Forum Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), target dari kegiatan ini adalah pembinan 11 KIM dan 2 kali pertunjukan rakyat. Dengan Alokasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan Rp. 30.854.100,- (61,71 %) terdapat penghematan sebesar Rp. 19.145.900,- dan realisasi fisik sebesar 61,70% berupa, fasilitasi jamuan/kunjungan tamu studi banding ke Kim Lentera dari Kab. Cilacap, fasilitasi jamuan/kunjungan tamu studi banding dari Kab. Semarang, , fasilitasi kegiatan Lomba FK METRA tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi pembentukan Forum KIM;
- 2.3.3.** Kegiatan Pendampingan PPID, target dari kegiatan yang dimaksud adalah 60 OPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 10.772.500,- (71,82%) dan realisasi fisik sebesar 71,80% terdiri dari pelaksanaan rapat koordinasi , sosialisasi PPID. Penyusunan daftar informasi publik .PPID Kabupaten Purbalingga berhasil memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi sebagai terbaik ke-11 kategori Kabupaten dengan melaksanakan keterbukaan informasi publik.
- 2.3.4.** Kegiatan Penyiaran Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi sebesar Rp. 3.400.000,- (13.60%) dengan realisasi fisik sebesar 13,60%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 21.600.000,-
- 2.3.5.** Kegiatan Konferensi Pers dan Liputan, target dari kegiatan ini adalah 284 kali kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 348.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 244.523.881,-

(70,27%) dengan realisasi fisik sebesar 70,30%, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 103.476.119,-

2.3.6. Kegiatan Peningkatan Kualitas Fungsi Bakohumas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 29.525.089,- (84,36%), realisasi fisik sebesar 84,40% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.474.911,-

2.3.7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kehumasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 47.824.500,- (77,76%) realisasi fisik sebesar 77,80%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 13.675.500,-

2.3.8. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemkab melalui Media Cetak dan Elektronik, target dari kegiatan yang dimaksud adalah 92 kali dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.582.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 157.988.500,- (95,41%) realisasi fisik sebesar 95,40%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.593.500,-.

2.3.9. Kegiatan Fasilitas Penerbitan dan Pengembangan Media Cetak Milik Pemerintah, target dari kegiatan yang dimaksud adalah 6 edisi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 110.720.500,- (88,29%) realisasi fisik sebesar 88,30%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 14.679.500,-

2.3.10. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab, target dari kegiatan yang di maksud adalah 276 kali dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 426.865.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 419.794.769,- (98,34%) realisasi fisik sebesar 98,30%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.070.231,-

2.3.11. Kegiatan Fasilitas LPPL, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 331.900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 262.619.958,- (79,13%), realisasi fisik sebesar 79,10%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 69.280.042,-

2.4. Program Pengelolaan Persandian

2.4.1. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sandi dan Telekomunikasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.000.000,-

realisasi keuangan sebesar Rp. 66.000.000,- (100%) realisasi fisik sebesar 100%.

2.5. Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

- 2.5.1. Kegiatan Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah, target kegiatan yang dimaksud adalah pengadaan 100 Buku Purbalingga Dalam Angka dan 180 buku Kecamatan Dalam Angka dimana masing-masing Kecamatan memperoleh 10 buku Kecamatan Dalam Angka, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.960.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 98.342.950,- (98,38%), realisasi fisik sebesar 98,40% terdapat sisa anggaran sebesar 1.617.050,-
- 2.5.2. Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PBDT Tahun 2015, dengan alokasi anggaran Rp. 400.000,- realisasi keuangan Rp. 338.500,- (84,63%), realisasi fisik sebesar 84,63%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 61.500,-
- 2.5.3. Kegiatan SIPD (Bangub), target dari kegiatan yang yang dimaksud adalah 80 buku SIPD SKPD dan 78 SIPD Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.580.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 73.610.500,- (98,70%), realisasi fisik sebesar 98,70%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 969.500,-

3. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam mengusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun anggaran 2017 Dinkominfo telah dilaksanakan sesuai dengan pentahapan yaitu melalui musrenbang kecamatan dilanjutkan dengan musrenbang Kabupaten, dan hasil dari musrenbang tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2017.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinkominfo tersebut mengacu kepada RPJMD Kab. Purbalingga 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Dinkominfo 2016 – 2021.

4. Permasalahan dan Solusi

- 4.1. Permasalahan yang dihadapi Dinkominfo dalam menjalankan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 4.1.1. Tidak terserapnya anggaran tahun 2017 secara maksimal dikarenakan banyak kegiatan yang dibiayai dari anggaran perubahan sementara waktunya sudah tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut.
 - 4.1.2. Sarana dan Prasarana Kantor yang masih terbatas, sehingga belum mendukung kinerja pegawai.
 - 4.2. Solusi yang dilakukan oleh Dinkominfo dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :
 - 4.2.1. Pada tahun 2018 ini kegiatan akan dimulai berjalan pada awal tahun supaya sampai batas waktu yang ditentukan kegiatan dapat selesai pada waktunya.
 - 4.2.2. Pada tahun 2018 ini mengajukan penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor yang belum ada sehingga dapat menunjang kinerja para pegawainya.

5. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Dinkominfo tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a) Juara II Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra) se- Jawa Tengah;
- b) Peringkat 11 penerima Penghargaan Badan Publik dalam penerapan keterbukaan informasi public;

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Pada hakekatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk menyajikan kinerja suatu Instansi Pemerintah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang telah berjalan yaitu T.A. 2017 guna mengetahui tingkat capaian kinerja, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian apabila ditemukan ketidakberhasilan dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya, sehingga di waktu yang akan datang akan lebih baik lagi.

1. Tingkat keberhasilan Dinkominfo Tahun 2017 :

1.1. Capaian Kinerja, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga menunjuk pada **skala “amat baik” yaitu rata-rata 115,9%**, yaitu dengan penyerapan anggaran sebesar 86,66% dan Realisasi fisik kegiatan sebesar 83,16%. Keberhasilan Dinkominfo dibuktikan dengan diperolehnya Penghargaan Dinkominfo selama tahun 2017 mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu :

1. Juara II Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra) se- Jawa Tengah;
2. Peringkat 11 penerima Penghargaan Badan Publik dalam penerapan keterbukaan informasi public;

Meskipun tingkat capaian kinerja Dinkominfo menunjuk pada skala amat baik namun masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu :

Dalam pelaksanaan pengelolaan belanja secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar hanya saja terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu :

- 1) Tidak terserapnya anggaran tahun 2017 secara maksimal dikarenakan banyak kegiatan yang dibiayai dari anggaran perubahan sementara waktunya sudah tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut.

- 2) Sarana dan Prasarana Kantor yang masih terbatas, sehingga belum mendukung kinerja pegawai.

B. Upaya mengatasi permasalahan :

1. Pada tahun 2018 ini kegiatan akan dimulai berjalan pada awal tahun supaya sampai batas waktu yang ditentukan kegiatan dapat selesai pada waktunya.
2. Pada tahun 2018 ini mengajukan penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor yang belum ada sehingga dapat menunjang kinerja para pegawainya.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika akan tetap mengupayakan agar lebih baik dengan meningkatkan kualitas manajemen perencanaan sehingga tidak akan ditemui lagi kendala-kendala yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 semoga dapat bermanfaat, terima kasih

Purbalingga, 6 Februari 2017

**Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga**


Tri Gunawan Setyadi, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP.19690222 199603 1 004

Lampiran 1

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

NO	SASARAN TARGET	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	R/T X 100
1	Meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD yng memiliki website	48 OPD	30 OPD	64%
		Intensitas updating informasi pada website Pemerintah Daerah	500 kali	527 kali	107,4%
		Jumlah SIM milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif	32 SIM	32 SIM	100%
		Jumlah pelayanan publik secara online	3 SIM	3 SIM	100%
		Cakupan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi	520 kali	1645 kali	316%
		Cakupan wilayah yang terjangkau oleh siaran radio Pemerintah Daerah	18 Kec	18 kec	100%
		Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan	11 Klp	11 klp	100%
		Cakupan kegiatan penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan dan radio	12 kali	11 kali	92%
		Jumlah kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan Instansi vertikal	2 kali	2 kali	100%
		Jumlah komunikasi dan kerjasama dengan media massa	30 kali	32 kali	107%

		(cetak dan online)			
		Jumlah kegiatan desiminasi informasi ke masyarakat melalui media masa	21 keg	23 keg	119%
		Ketersediaan data dasar pembangunan	198 buku	198 buku	100%
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana Persandian	Cakupan informasi Pemerintah Daerah melalui SANTEL yang tersampaikan	18 kec	18 kec	100%

Lampiran 2:
Laporan Realisasi Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

per 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan : 2.10		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika						
Unit Organisasi : 2.10.01		Dinas Komunikasi dan Informatika						
Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01		Dinas Komunikasi dan Informatika						
KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
2.10.2.10.01.01.01	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	873.800.000,00	73.668.000,00	447.790.575,00	184.808.600,00	706.267.175,00	80,83	167.532.825,00
2.10.2.10.01.01.01.01	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	247.000.000,00	68.100.000,00	111.371.055,00	0,00	179.471.055,00	72,66	67.528.945,00
2.10.2.10.01.01.01.02	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	200.000.000,00	0,00	194.807.872,00	0,00	194.807.872,00	97,40	5.192.128,00
2.10.2.10.01.01.01.03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	174.000.000,00	0,00	109.772.550,00	0,00	109.772.550,00	63,09	64.227.450,00
2.10.2.10.01.01.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	187.800.000,00	0,00	800.000,00	184.808.600,00	185.608.600,00	98,83	2.191.400,00
2.10.2.10.01.01.01.07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	55.000.000,00	0,00	26.836.498,00	0,00	26.836.498,00	48,79	28.163.502,00
2.10.2.10.01.01.01.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	10.000.000,00	5.568.000,00	4.202.600,00	0,00	9.770.600,00	97,71	229.400,00
2.10.2.10.01.01.15	Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi	770.476.000,00	59.550.000,00	492.934.358,00	189.944.939,00	742.429.297,00	96,36	28.046.703,00
2.10.2.10.01.01.15.01	Pemeliharaan Website dan Jaringan Internet	45.900.000,00	25.010.000,00	18.579.665,00	0,00	43.589.665,00	94,97	2.310.335,00
2.10.2.10.01.01.15.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi informaasi terintegrasi	489.576.000,00	0,00	363.510.822,00	115.265.646,00	478.776.468,00	97,79	10.799.532,00
2.10.2.10.01.01.15.03	Teleconference ,SMS Center dan paper less office	110.000.000,00	4.340.000,00	59.171.655,00	34.044.793,00	97.556.448,00	88,69	12.443.552,00
2.10.2.10.01.01.15.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE	125.000.000,00	30.200.000,00	51.672.216,00	40.634.500,00	122.506.716,00	98,01	2.493.284,00
2.10.2.10.01.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1.599.247.000,00	114.515.000,00	1.108.437.847,00	107.073.500,00	1.330.026.347,00	83,17	269.220.653,00
2.10.2.10.01.01.16.11	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab	426.865.000,00	0,00	388.794.769,00	31.000.000,00	419.794.769,00	98,34	7.070.231,00
2.10.2.10.01.01.16.12	Fasilitasi LPPL	331.900.000,00	22.500.000,00	223.229.958,00	16.890.000,00	262.619.958,00	79,13	69.280.042,00
2.10.2.10.01.01.16.01	Pembinaan dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Warnet	15.000.000,00	0,00	12.489.550,00	2.300.000,00	14.789.550,00	98,60	210.450,00
2.10.2.10.01.01.16.02	Fasilitasi dan Pembinaan Forum Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	50.000.000,00	0,00	30.854.100,00	0,00	30.854.100,00	61,71	19.145.900,00
2.10.2.10.01.01.16.03	Pembangunan Gedung LPPL Radio Ardilawet Purbalingga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.2.10.01.01.16.04	Operasional pendampingan PPID	15.000.000,00	4.800.000,00	5.972.500,00	0,00	10.772.500,00	71,82	4.227.500,00
2.10.2.10.01.01.16.05	Penyiaran Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	25.000.000,00	2.400.000,00	1.000.000,00	0,00	3.400.000,00	13,60	21.600.000,00
2.10.2.10.01.01.16.06	Konsfrensi Pers dan Liputan	348.000.000,00	66.825.000,00	120.815.381,00	56.883.500,00	244.523.881,00	70,27	103.476.119,00
2.10.2.10.01.01.16.07	Peningkatan Kulitas Fungsi Bakohumas	35.000.000,00	2.430.000,00	27.095.089,00	0,00	29.525.089,00	84,36	5.474.911,00
2.10.2.10.01.01.16.08	Peningkatan Kapasitas Kehumasan	61.500.000,00	0,00	45.037.500,00	0,00	45.037.500,00	73,23	16.462.500,00
2.10.2.10.01.01.16.09	Sosialisasi Kebijakan Pemkab melalui Media Cetak dan Elektronik	165.582.000,00	0,00	157.988.500,00	0,00	157.988.500,00	95,41	7.593.500,00
2.10.2.10.01.01.16.10	Fasilitasi Penerbitan dan Pengembangan Media Cetak Milik Pemerintah	125.400.000,00	15.560.000,00	95.160.500,00	0,00	110.720.500,00	88,29	14.679.500,00
2.14.2.10.01.01.15	Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	174.940.000,00	52.440.000,00	119.851.950,00	0,00	172.291.950,00	98,49	2.648.050,00
2.14.2.10.01.01.15.01	Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah	99.960.000,00	4.800.000,00	93.542.950,00	0,00	98.342.950,00	98,38	1.617.050,00
2.14.2.10.01.01.15.02	Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah / SIPD (Bangub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.10.01.01.15.04	Verifikasi dan Validasi Data PBDT Tahun 2015	400.000,00	0,00	338.500,00	0,00	338.500,00	84,63	61.500,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
2.14. 2.10.01.01 . 15.05	SIPD (Bangub)	74.580.000,00	47.640.000,00	25.970.500,00	0,00	73.610.500,00	98,70	969.500,00
2.15. 2.10.01.01 . 15	Program Pengelolaan Persandian	66.000.000,00	0,00	58.220.000,00	7.780.000,00	66.000.000,00	100,00	0,00
2.15. 2.10.01.01 . 15.01	Pengadaan dan Pemeliharaan Sandi dan Telekomunikasi	66.000.000,00	0,00	58.220.000,00	7.780.000,00	66.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		3.484.463.000,00	300.173.000,00	2.227.234.730,00	489.607.039,00	3.017.014.769,00	86,58	467.448.231,00

Purbalingga, 31 Desember 2017
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Tri Gunawan Setyadi, SH, MH
NIP. 19690222 199603 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
CAPAIAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEADAAN SAMPAI BULAN TAHUN 2017

No.	Nama Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	KEUANGAN (%)		FISIK (%)		Ket
					TARGET	REAL	TARGET	REAL	
1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	247.000.000	179.471.055	67.528.945	48.58	72.66	100.00	72.70	
2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	200.000.000	194.807.872	5.192.128	50.00	97.40	100.00	97.40	
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	174.000.000	109.772.500	64.227.500	68.97	63.09	100.00	63.10	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	187.800.000	185.608.600	2.191.400	42.60	98.83	100.00	98.80	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	55.000.000	26.836.498	28.163.502	100.00	48.79	100.00	48.80	
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	10.000.000	9.770.600	229.400	100.00	97.71	100.00	97.70	
7	Pemeliharaan Website dan Jaringan Internet	45.900.000	43.589.665	2.310.335	84.31	94.97	100.00	95.00	
8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi informaasi terintegrasi	489.576.000	478.776.468	10.799.532	69.16	97.79	100.00	97.80	
9	Teleconference ,SMS Center dan paper less office	110.000.000	97.556.448	12.443.552	100.00	88.69	100.00	88.70	
10	Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE	125.000.000	122.506.716	2.493.284	100.00	98.01	100.00	98.00	
11	Pembinaan dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Warnet	15.000.000	14.789.550	210.450	100.00	98.60	100.00	98.60	
12	Fasilitasi dan Pembinaan Forum Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	50.000.000	30.854.100	19.145.900	100.00	61.71	100.00	61.70	
13	Operasional pendampingan PPID	15.000.000	10.772.500	4.227.500	100.00	71.82	100.00	71.80	
14	Penyiaran Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	25.000.000	3.400.000	21.600.000	100.00	13.60	100.00	13.60	
15	Konsfrensi Pers dan Liputan	348.000.000	244.523.881	103.476.119	50.00	70.27	100.00	70.30	

16	Peningkatan Kualitas Fungsi Bakohumas	35.000.000	29.525.089	5.474.911	100.00	84.36	100.00	84.40	
17	Peningkatan Kapasitas Kehumasan	61.500.000	45.037.500	16.462.500	100.00	73.23	100.00	73.23	
18	Sosialisasi Kebijakan Pemkab melalui Media Cetak dan Elektronik	165.582.000	157.988.500	7.593.500	391.09	95.41	100.00	95.40	
19	Fasilitasi Penerbitan dan Pengembangan Media Cetak Milik Pemerintah	125.400.000	110.720.500	14.679.500	100.00	88.29	100.00	88.30	
20	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab	426.865.000	419.794.769	7.070.231	92.62	98.34	100.00	98.30	
21	Pengadaan dan Pemeliharaan Sandi dan Telekomunikasi	66.000.000	66.000.000	0	100.00	100.00	100.00	100.00	
22	Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah	99.960.000	98.342.950	1.617.050	100.00	98.38	100.00	98.40	
23	Verifikasi dan Validasi Data PBDT Tahun 2015	400.000	338.500	61.500	100.00	84.63	100.00	84.63	
24	Fasilitasi LPPL	331.900.000	262.619.958	69.280.042	100.00	79.13	100.00	79.10	
25	SIPD (Bangub)	74.580.000	73.610.500	969.500	100.00	98.70	100.00	98.70	
26	Total	3.484.463.000	3.017.014.719	467.448.281	99.60	86.58	100.00	82.98	





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Tri Gunawan Setyadi, SH, MH
Bendahara Pengeluaran : Nisa Utami, A.Md
Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.930.109.000,00	1.788.437.660,00	129.525.400,00	1.917.963.060,00	1.917.963.060,00	12.145.940,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	209.440.000,00	193.617.666,00	15.037.474,00	208.655.140,00	208.655.140,00	784.860,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	144.105.000,00	133.020.000,00	11.085.000,00	144.105.000,00	144.105.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	442.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	60.787.000,00	56.120.000,00	4.195.000,00	60.315.000,00	60.315.000,00	472.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	116.524.000,00	106.312.560,00	8.690.400,00	115.002.960,00	115.002.960,00	1.521.040,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.239.000,00	4.909.299,00	122.651,00	5.031.950,00	5.031.950,00	207.050,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	33.000,00	28.030,00	2.213,00	30.243,00	30.243,00	2.757,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	55.812.000,00	51.295.314,00	4.336.885,00	55.632.199,00	55.632.199,00	179.801,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Kematian	5.000.000,00	4.593.615,00	388.580,00	4.982.195,00	4.982.195,00	17.805,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	3.674.548,00	310.862,00	3.985.410,00	3.985.410,00	14.590,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	822.135.000,00	0,00	0,00	0,00	816.492.000,00	5.643.000,00
			681.392.000,00	135.100.000,00	816.492.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	303.685.000,00	0,00	0,00	0,00	228.905.000,00	74.780.000,00
			159.340.000,00	69.565.000,00	228.905.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			600.000,00	300.000,00	900.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			600.000,00	300.000,00	900.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	66.300.000,00	0,00	0,00	0,00	66.300.000,00	0,00
			44.200.000,00	22.100.000,00	66.300.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.222.000,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00	54.000,00
			3.168.000,00	0,00	3.168.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.547.000,00	0,00	0,00	0,00	56.759.060,00	3.787.940,00
			0,00	0,00	0,00		
			36.245.660,00	20.513.400,00	56.759.060,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.090.000,00	0,00	0,00	0,00	3.526.200,00	563.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.861.700,00	664.500,00	3.526.200,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.442.000,00	0,00	0,00	0,00	5.449.900,00	992.100,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.102.900,00	2.347.000,00	5.449.900,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.641.000,00	0,00	0,00	0,00	5.621.500,00	19.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.691.000,00	1.930.500,00	5.621.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	358.500,00	1.321.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			260.500,00	98.000,00	358.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	1.153.450,00	741.550,00
			0,00	0,00	0,00		
			710.000,00	443.450,00	1.153.450,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Perlengkapan Kantor	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	14.894.050,00	55.950,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.094.050,00	800.000,00	14.894.050,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.680.000,00	0,00	0,00	0,00	7.214.283,00	3.465.717,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.999.656,00	1.214.627,00	7.214.283,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.964.980,00	935.020,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.345.720,00	619.260,00	2.964.980,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	93.600.000,00	0,00	0,00	0,00	51.315.208,00	42.284.792,00
			0,00	0,00	0,00		
			37.311.212,00	14.003.996,00	51.315.208,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.896.000,00	0,00	0,00	0,00	7.499.000,00	397.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.265.000,00	1.234.000,00	7.499.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	374.860.000,00	0,00	0,00	0,00	356.856.869,00	18.003.131,00
			0,00	0,00	0,00		
			290.348.942,00	66.507.927,00	356.856.869,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	3.255.608,00	184.392,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.215.608,00	40.000,00	3.255.608,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	2.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.350.000,00	0,00	1.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Dokumentasi	4.405.000,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00	4.102.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			302.500,00	0,00	302.500,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Publikasi	569.660.000,00	0,00	0,00	0,00	532.960.000,00	36.700.000,00
			67.820.000,00	19.200.000,00	87.020.000,00		
			394.676.500,00	51.263.500,00	445.940.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Akomodasi	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Hiburan / Rias	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00
			2.200.000,00	0,00	2.200.000,00		
			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Ketertiban Umum	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00
			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Operator	88.000.000,00	0,00	0,00	0,00	63.800.000,00	24.200.000,00
			46.200.000,00	17.600.000,00	63.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Tenaga Sosial / Pelayanan	148.800.000,00	0,00	0,00	0,00	125.600.000,00	23.200.000,00
			103.000.000,00	22.600.000,00	125.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.955.000,00	0,00	0,00	0,00	5.840.500,00	114.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.228.000,00	1.612.500,00	5.840.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.670.000,00	0,00	0,00	0,00	17.355.500,00	7.314.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.578.500,00	6.777.000,00	17.355.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	101.370.000,00	0,00	0,00	0,00	73.372.200,00	27.997.800,00
			59.877.200,00	10.642.500,00	70.519.700,00		
			2.340.500,00	512.000,00	2.852.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.851.350,00	3.148.650,00
			0,00	0,00	0,00		
			411.000,00	2.440.350,00	2.851.350,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	161.592.000,00	0,00	0,00	0,00	156.205.000,00	5.387.000,00
			99.640.000,00	44.000.000,00	143.640.000,00		
			10.810.000,00	1.755.000,00	12.565.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.686.000,00	0,00	0,00	0,00	24.182.100,00	3.503.900,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.955.300,00	14.226.800,00	24.182.100,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.175.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	3.675.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.150.000,00	6.350.000,00	9.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88.684.000,00	0,00	0,00	0,00	67.097.950,00	21.586.050,00
			0,00	0,00	0,00		
			43.841.750,00	23.256.200,00	67.097.950,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.229.400,00	1.470.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.471.900,00	1.757.500,00	7.229.400,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.742.500,00	257.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.790.000,00	952.500,00	2.742.500,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.325.000,00	0,00	0,00	0,00	100.805.000,00	22.520.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			81.435.000,00	19.370.000,00	100.805.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	366.510.000,00	0,00	0,00	0,00	310.390.884,00	56.119.116,00
			0,00	0,00	0,00		
			230.058.911,00	80.331.973,00	310.390.884,00		
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.836.498,00	28.163.502,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.983.998,00	1.852.500,00	26.836.498,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	10.029.500,00	7.720.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.585.000,00	3.444.500,00	10.029.500,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	29.110.000,00	0,00	0,00	0,00	27.173.000,00	1.937.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.254.000,00	6.919.000,00	27.173.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	49.655.000,00	0,00	0,00	0,00	28.988.490,00	20.666.510,00
			12.500.000,00	0,00	12.500.000,00		
			15.008.490,00	1.480.000,00	16.488.490,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Pemeliharaan Jaringan	61.531.000,00	0,00	0,00	0,00	59.803.750,00	1.727.250,00
			4.334.500,00	24.930.000,00	29.264.500,00		
			30.539.250,00	0,00	30.539.250,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	47.650.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	3.500.000,00
			34.450.000,00	9.700.000,00	44.150.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 22 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.700.000,00	1.700.000,00		
5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			19.500.000,00	0,00	19.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	39.740.000,00	0,00	0,00	0,00	39.740.000,00	0,00
			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
			2.000.000,00	7.740.000,00	9.740.000,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	74.050.000,00	0,00	0,00	0,00	72.413.600,00	1.636.400,00
			72.413.600,00	0,00	72.413.600,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.240.000,00	260.000,00
			11.500.000,00	6.750.000,00	18.250.000,00		
			0,00	990.000,00	990.000,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	46.600.000,00	0,00	0,00	0,00	44.968.000,00	1.632.000,00
			44.968.000,00	0,00	44.968.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00	81.643.623,00	856.377,00
			50.743.623,00	16.000.000,00	66.743.623,00		
			14.900.000,00	0,00	14.900.000,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	29.902.000,00	0,00	0,00	0,00	29.536.170,00	365.830,00
			10.021.170,00	13.200.000,00	23.221.170,00		
			5.315.000,00	1.000.000,00	6.315.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	79.285.000,00	0,00	0,00	0,00	79.229.646,00	55.354,00
			36.855.146,00	0,00	36.855.146,00		
			32.434.500,00	9.940.000,00	42.374.500,00		
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	43.420.000,00	80.000,00
			39.920.000,00	0,00	39.920.000,00		
			0,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.933.500,00	66.500,00
			0,00	19.975.000,00	19.975.000,00		
			808.500,00	150.000,00	958.500,00		
5 . 2 . 3 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.750.000,00	1.750.000,00		
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	12.780.000,00	0,00	0,00	0,00	12.532.500,00	247.500,00
			0,00	4.752.500,00	4.752.500,00		
			7.780.000,00	0,00	7.780.000,00		
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH		6.838.089.000,00	2.342.448.692,00	173.694.465,00	2.516.143.157,00	6.349.649.926,00	488.439.074,00
			1.642.243.239,00	438.715.000,00	2.080.958.239,00		
			1.388.060.547,00	364.487.983,00	1.752.548.530,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Penerimaan	
- SP2D	6.535.815.868,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	2.560.364,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	10.296.540,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	55.504.158,00
- Lain-lain	0,00
Jumlah Penerimaan	6.604.176.930,00
Pengeluaran	
- SPJ (LS + UP/GU/TU)	6.365.043.326,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	2.560.364,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	10.296.540,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	55.504.158,00
- Lain-lain	170.772.542,00
Jumlah Pengeluaran	6.604.176.930,00
Saldo Kas	0,00

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Tri Gunawan Setyadi, SH, MH

NIP. 196902231996031004

EMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINKOMINFO

PURBALINGGA

Purbalingga,

Bendahara Pengeluaran

Nisa Utami, A.Md

NIP. 19861027201001213

